

WACANA DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI JOMBANG

Dwi Tunggal Sari

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya

dwitunggals@gmail.com

Ali Imron

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya

aimron8883@gmail.com

Abstrak

Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga keagamaan yang berhak memberikan putusan perihal masalah keagamaan salah satunya adalah perkawinan. Berbicara masalah perkawinan maka tidak terlepas dengan masalah seksualitas, karena dengan perkawinan yang sah menurut hukum nasional dan agama, maka hubungan seksualitas seseorang sudah mendapatkan legalitas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan perspektif wacana Michel Foucault, menurut Foucault wacana tidaklah dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi mengikuti sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep, atau efek). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan di bawah umur adalah salah satu bentuk upaya pemerintah agar setiap masyarakat tidak terlepas dari peraturan yang telah ada. Dispensasi dalam permohonan perkawinan di bawah umur tidak dapat sepenuhnya diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi dalam permohonan perkawinan di bawah umur itu lebih kepada pelaporan izin perkawinan di bawah umur, mengingat masih banyaknya perkawinan yang dilakukan di “bawah tangan”. Praktik relasi kekuasaan dalam dispensasi perkawinan di bawah umur sejalan dengan teori Foucault sebagai proses pengendalian sesuai dengan prinsip bahwa negara harus melakukan penguasaan sampai pada tubuh-tubuh yang menjadi tempat dari ideologi.

Kata Kunci: Wacana, Kuasa, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Pengadilan Jombang

Abstract

Religious courts is a religious institution entitled to make a decision regarding religious issues one of which is marriage. Talk about marriage then it can not be separated with the issue of sexuality, because the marriage is valid according to national law and religion, the relationship sexuality someone already getting legality. This study is a qualitative study using discourse perspective of Michel Foucault, because it is not understood as a series of words or proposition in the text, but follow something else to produce (idea, concepts, or effect). The result of this study indicated that the presence of underage marriage dispensation is one of the government to any society can not be separated from the existing regulations. Dispensation in the petition marriage minors can not be fully interpreted as an exception to the general rule for special circumstances or exemption from an obligation or prohibition. Dispensation in the solicitation of underage marriage was rather the reporting of underage marriage licenses, given the number of marriages conducted under the hand or not legal in Indonesia. Practice of power relations in the dispensation of underage marriage in line with Foucault's theory as a control process in accordance with the principle that the state controlling bodies arrive at a place of ideology .

Keywords: Power Relations, Dispensation and Underage Marriage

*) Terima kasih kepada Ardhie Raditya selaku mitra bestari yang telah mereview dan memberi masukan berharga terhadap naskah ini.

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga keagamaan yang berhak memberikan putusan perihal masalah keagamaan salah satunya adalah perkawinan. Pengadilan Agama bertugas memberikan putusan bagi calon pengantin di bawah umur yang hendak menikah dengan prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu dengan menjalani sidang untuk mendapatkan surat dispensasi perkawinan. Hal tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama. Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1989 yaitu, menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman, menerima, memeriksa, memutus, dan perkara antara orang-orang beragama Islam, memberikan keterangan instansi pemerintah jika diminta, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Berbicara masalah perkawinan maka tidak terlepas dengan masalah seksualitas, karena dengan perkawinan yang sah menurut hukum nasional dan agama, maka hubungan seksualitas seseorang sudah mendapatkan legalitas. Foucault sebagai salah satu pemikir dari Prancis mencoba untuk memberikan definisi dan sebuah proposisi terhadap seks dan seksualitas. Foucault memberikan pernyataan yang sangat kontroversial tentang seks yang dihubungkan dengan konsep kekuasaan. Konsep tersebut menyebutkan bahwa seksualitas merupakan pemindahan pemahaman yang padat dalam hubungan kekuasaan (Ritzer. 2004: 54).

Berbicara masalah kekuasaan menurut Michel Foucault tentang "*Power and Knowledge*", bahwa kekuasaan dengan pengetahuan berada dalam satu relasi yang tidak terpisahkan. Foucault mengibaratkan keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Jika membahas masalah kekuasaan, maka saat itu juga ada sebuah entitas pengetahuan yang mengikutinya, begitu juga sebaliknya jika pengetahuan itu terus menerus dialami maka secara langsung atau tidak akan menimbulkan efek kekuasaan. (Foucault.2002:89).

Seperti halnya dalam masalah perkawinan, norma yang ada pada masyarakat memberikan pengertian bahwa perkawinan yang sah dan normal adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan. Keduanya melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun secara hukum nasional. Tidak ada bentuk perkawinan lain yang diperbolehkan, termasuk perkawinan sejenis.

Pemerintah memiliki kontrol untuk membentuk masyarakat yang disiplin. Pengontrolan tersebut tidak dilakukan dengan cara yang represif melainkan dengan cara yang positif dan produktif, salah satunya adalah pengontrolan lewat wacana.

Wacana merupakan wujud dari tindakan sosial dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak yang memproduksinya. Untuk membentuk masyarakat yang disiplin, pemerintah tidak melakukan pengawasan terus menerus, tapi bukan berarti pemerintah tidak mengawasi. Lewat wacana, masyarakat dapat dikontrol dan disiplinkan, maka ada sebuah kekuasaan yang sedang dipraktikkan dalam hal ini.

Wacana tercipta sebagai efek timbal balik antara kekuasaan dan pengetahuan. Menurut Foucault kekuasaan bisa muncul dalam tiap relasi, memproduksi pengetahuannya mengenai kebenaran. Pengetahuan melalui kebenaran ini lalu menghasilkan berbagai wacana dan melalui wacana inilah masyarakat diatur agar mengikuti aturan kebenaran tersebut. (Eriyanto. 2001:75) Seperti halnya dalam kasus perkawinan di bawah umur, untuk mencegah hal itu terjadi, masyarakat dikontrol lewat wacana, salah satunya dengan undang-undang perkawinan mengenai pembatasan usia minimal perkawinan. Bagi calon pengantin yang melakukan perkawinan di bawah usia minimal yang ditetapkan, maka perkawinan tersebut belum dapat disetujui sebelum melakukan sidang di Pengadilan Agama.

Hal ini merupakan salah satu contoh adanya praktik kekuasaan, lewat undang-undang masyarakat dapat dikontrol untuk membentuk masyarakat yang disiplin. Penelitian ini akan berfokus untuk membongkar praktik relasi kuasa dalam pemberian dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Jombang.

KAJIAN PUSTAKA

Foucault sebagai salah satu pemikir postmodernisme mengenalkan konsep kekuasaan berbeda dari konsep-konsep umum sebelumnya, gagasan Foucault tentang kekuasaan lebih realistis dan orisinal. Foucault tidak mendefinisikan apa itu kekuasaan, tetapi lebih menekankan bagaimana kekuasaan itu dipraktikkan, diterima, dan dilihat sebagai kebenaran. Kuasa oleh Foucault tidak dimaknai dalam (*term*) kepemilikan, dimana

seseorang mempunyai sumber kekuasaan tertentu. Kuasa tidak dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain.

Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu, dimana ia berasumsi bahwa strategi kuasa berlangsung dimana-mana. Pada lapisan masyarakat terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi. Pada saat ada individu yang mempunyai hubungan tertentu satu sama lain, disitulah ada kekuasaan yang sedang bekerja. Bagi Foucault, kekuasaan selalu berbasis pada pengetahuan, dan pengetahuan selalu mempunyai efek kekuasaan.

Penyelenggara kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya. Pengetahuan bukan merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa, melainkan pengetahuan berada di dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.

Wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menghasilkan efek kuasa. Kebenaran oleh Foucault tidak dipahami sebagai sesuatu yang datang secara kebetulan, bukan juga sebuah konsep yang abstrak, melainkan kebenaran itu ada karena diproduksi. Setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri dimana khalayak dituntun untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut. Disini, setiap kekuasaan selalu menghasilkan kebenaran tertentu yang disebarakan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan. Kuasa tidak bekerja melalui penindasan dan represi melainkan melalui normalisasi dan regulasi. Menurut Foucault, kuasa tidak bersifat subjektif, kuasa tidak bekerja dengan cara negatif dan represif, melainkan dengan cara positif dan produktif.

Strategi kuasa tidak bekerja melalui penindasan, melainkan melalui normalisasi dan regulasi, menghukum dan membentuk publik yang disiplin. Publik tidak dikontrol lewat kekuasaan yang bersifat fisik, tetapi dikontrol, diatur, dan disiplin lewat wacana (Foucault.2004:206). Kekuasaan dalam pandangan Foucault disalurkan melalui hubungan sosial, dimana memproduksi bentuk-bentuk kategori perilaku sebagai baik atau buruk, sebagai bentuk pengendalian perilaku. Relasi sosial itulah yang memproduksi bentuk subjektifitas dan perilaku secara sederhana sebagai bentuk pembatasan. Akhirnya masyarakat ditundukkan bukan dengan cara kontrol yang bersifat langsung dan fisik, tetapi dengan wacana dan mekanisme berupa prosedur,

aturan, tata cara dan sebagainya. Wacana dalam perspektif Foucault bukanlah sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks, melainkan sesuatu yang memproduksi sesuatu yang lain, wacana melihat kata-kata bahasa dari dua segi, yaitu arti dan referensi. Maksudnya, selain bertujuan menyampaikan suatu bahasa, wacana juga ingin menyatakan tentang sesuatu. Wacana membentuk dan mengkonstruksikan peristiwa tertentu dan gabungan dari peristiwa-peristiwa tersebut kedalam narasi yang dapat dikenali oleh kebudayaan tertentu. Analisis wacana Michel Foucault menitikberatkan pemikiran pada "kuasa". Kuasa merupakan topik sentral pemikiran Foucault dalam analisis wacana. Menurutnya, kekuasaan itu bersifat inheren dari semua formasi diskursif. Faktor terpenting yang harus diketahui bukan tentang definisi kekuasaan melainkan bagaimana terjadi dan berfungsinya kuasa dalam kehidupan bermasyarakat. Foucault menyatakan terjadi dan berfungsinya kuasa di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Kedua hal ini saling berkaitan satu sama lain, dengan kata lain kuasa terbentuk dari ilmu pengetahuan, sebaliknya pengetahuan akan melahirkan kekuasaan.

Analisis wacana yang diungkapkan Foucault bukan sekedar aturan bagaimana cara berbicara, tetapi juga aturan-aturan yang menentukan sifat pengetahuan, kekuasaan, dan etika dalam berkomunikasi. Selain itu, pemikiran Foucault memberi pencerahan bagi elit kuasa untuk memilih isi dan gaya dari apa yang dikomunikasikan, sehingga manipulasi dan distorsi komunikasi tidak terjadi lagi. Melalui konsep kekuasaan Foucault menyatakan bahwa hubungan sosial menunjukkan komunikasi tidak selalu berlangsung dengan dasar kesetaraan. Oleh karena itu, kehidupan bermasyarakat akan berlangsung aman, damai, dan tenang jika tata cara berkomunikasi didasarkan pada apa yang dikatakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Selain itu digunakan untuk menghasilkan data yang mendalam serta mendapatkan gambaran secara menyeluruh khususnya mengenai praktik relasi kuasa dalam wacana pemberian dispensasi pernikahan di bawah umur. Perolehan data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka-

angka, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran dalam penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, foto, dokumen pribadi maupun dokumen resmi.

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Jombang, karena menurut data 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2010-2012 terjadi peningkatan yang signifikan dalam permohonan dispensasi perkawinan

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dari Michel Foucault, karena menurut Foucault wacana tidaklah dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi mengikuti sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep, atau efek). Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konsep tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu. Analisis wacana kritis tidak dipusatkan pada kebenaran atau ketidakbenaran struktur tata bahasa atau proses penafsiran, melainkan menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna (Moleong, 2002:188). Proses pengumpulan data dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber utama.

Penggalan data primer melalui dua cara. *Pertama*, menggunakan teknik observasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengikuti persidangan dan mengamati proses persidangan di Pengadilan Agama Jombang yang dipimpin oleh pihak Majelis Hakim dan Pemohon. Peneliti juga aktif mengikuti proses persidangan perolehan surat Dispensasi Pernikahan. Informasi yang diperoleh peneliti selama berada di lapangan, peneliti salin dalam sebuah catatan lapangan (*field note*) sebagai acuan yang digunakan oleh peneliti untuk menyusun laporan penelitian. Hal ini dilakukan peneliti dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan terlupakan karena keterbatasan daya serap dan daya ingat yang dimiliki peneliti. *Kedua*, wawancara secara mendalam yang dilakukan dengan bapak Faiq selaku panitera Pengadilan Agama Jombang dan dengan pihak pemohon. Wawancara merupakan serangkaian percakapan yang di dalamnya diteliti secara perlahan memasukkan beberapa unsur baru untuk membantu informan memberi jawaban.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana kritis Michel Foucault, yaitu tentang

bagaimana wacana diproduksi, siapa yang memproduksi dan apa efek dari produksi wacana tersebut. Khalayak ditundukkan bukan dengan cara kontrol yang bersifat langsung dan fisik, tetapi dengan wacana dan mekanisme, berupa prosedur, aturan, tata cara, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan umur perkawinan secara hukum dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1, bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Sebuah perkawinan dikatakan kasus perkawinan di bawah umur ketika usia dari salah satu dan atau kedua mempelai berada di bawah usia yang telah ditetapkan tersebut. Proses pemberian izin praktik inkonstitusional inilah yang selanjutnya disebut sebagai dispensasi yang mana sering diartikan sebagai pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus. Pemberian dispensasi untuk kasus perkawinan di bawah umur di Indonesia merupakan wewenang dari Pengadilan Agama yang ditugaskan secara khusus untuk menangani urusan pernikahan di Indonesia. Hal ini senada dengan penuturan dari panitera Pengadilan Agama Jombang bahwa, pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur merupakan salah satu wujud dari kesadaran hukum masyarakat. Sehingga, ketika jumlah pengajuan dispensasi pernikahan umur meningkat, maka berarti kesadaran hukum masyarakat juga bertambah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan definisi bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Undang-undang tersebut memaparkan terdapat tiga poin penting komponen yang menyusun perkawinan, yaitu *pertama* ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri; *kedua* untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal; *ketiga* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri merupakan sebuah bentuk pengecualian terhadap ikatan yang ada antara pria dan wanita, dimana ikatan yang diakui sebagai suami isteri hanya yang sesuai dengan kriteria yang dijelaskan selanjutnya.

Dalam hal ini, pemerintah juga menetapkan adanya suatu pencatatan dan syarat pengesahan dari ikatan perkawinan yang dilakukan oleh negara melalui hakim. Dengan adanya aturan ini, secara tidak langsung pemerintah telah meninggikan dirinya sebagai satu-satunya lembaga yang berhak untuk memberikan sebuah keputusan terkait dengan keabsahan suatu perkawinan.

Poin kedua dari definisi perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan sebuah tujuan dari perkawinan yang sesungguhnya, yaitu untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Penjelasan dari poin kedua ini dapat ditemukan dalam pasal syarat yang mana berisi tentang izin kawin, batas usia, penekanan aturan tentang jumlah isteri dan suami serta tatacara untuk memiliki isteri dan suami lebih dari satu. Pada poin ini, pemerintah ingin memberikan wawasan bahwa agar seseorang memiliki rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus dijalankan oleh rakyat. Sehingga secara tidak langsung, pemerintah melalui aturan ini menjelaskan bahwa ketika rakyatnya menikah dengan tidak terpenuhinya syarat yang telah ditetapkan pemerintah tersebut, maka dia akan mengalami masalah dalam rumah tangganya yang juga mungkin hidupnya tidak bahagia dan perkawinannya tidak kekal.

Poin ketiga dalam definisi perkawinan yang dijabarkan oleh pemerintah adalah tentang peran agama dalam perkawinan (berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Di sini pemerintah tidak lupa bahwa aturan tentang perkawinan yang pertama kali ada adalah berasal dari aturan agama. Sehingga dalam tata aturan lebih lanjut maka penjelasan tentang perkawinan ini juga harus disesuaikan dengan budaya masyarakat yang telah bersatu dengan agama yang dianut. Hal ini telah dijelaskan juga dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, poin ini juga dijabarkan dengan pembatalan, perceraian, dan harta yang semuanya itu diturunkan dari aturan agama yang berlaku. Dalam poin ini, pemerintah secara tersirat menjelaskan bahwa sebenarnya perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, bahkan dengan adanya Undang-undang pernikahan, pemerintah ingin memperbaiki dan mengatur agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat lebih menjamin kebahagiaan dan kekekalan hubungan mereka.

Praktik pemberian dispensasi yang hanya dikenakan pada kondisi khusus ini sebenarnya merupakan salah satu proses pemberian pengetahuan oleh penguasa

bahwa kasus pernikahan di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang bukanlah suatu hal yang normal. Dengan pemberian label tidak normal ini, maka diharapkan nantinya akan membuat sebagian orang tua yang hendak menikahkan anaknya di bawah usia yang telah ditentukan oleh pemerintah merasa malu kepada lingkungan sekitarnya. Karena masyarakat lingkungannya telah memberikan standar terkait usia mana yang pantas dipakai untuk pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah.

Foucault menyebutkan bahwa kekuasaan dan pengetahuan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan dan pengetahuan dijustifikasi melalui berbagai lembaga resmi. Pengetahuan tidak akan diakui kebenarannya ketika tidak mendapat pengakuan dari sebuah lembaga. Peran lembaga dalam mengatur kuasanya, dimana menciptakan sesuatu yang kemudian dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi masyarakat, yang mana pengetahuan tersebut akan mampu mempengaruhi perilaku masyarakat untuk kedepannya. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya tentang Undang-Undang Pernikahan, dapat diketahui bahwa pembuatan undang-undang pernikahan merupakan sebuah proses pemberian pengetahuan terkait nikah yang baik bagi masyarakat Indonesia.

Untuk memperlancar penyebaran pengetahuan yang diyakini kebenarannya oleh penguasa tersebut, dalam undang-undang yang bersangkutan terdapat sebuah ayat yang difungsikan untuk memberikan pengetahuan dan pembelajaran terkait Pernikahan agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Karena proses penguasaan pemerintah terkait pernikahan tidak akan pernah tercapai selama aturan dan alasan terkait pembuatan aturan tersebut tidak disosialisasikan dengan baik dan menjadi pengetahuan bagi masyarakat luas. Sedangkan semua peraturan yang ditetapkan akan berjalan sebagaimana yang diharapkan apabila sosialisasi atau pemberian wawasan terkait hal itu dilakukan dengan sempurna. Permohonan dispensasi merupakan sebuah wujud tindakan dari kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Terkait hukum atau aturan, teori Foucault memandang bahwa hukum adalah elemen dalam perluasan kekuasaan. Sebagai elemen untuk memperkuat kekuasaan, hukum berusaha agar segala sesuatu yang dijalankan oleh orang yang berada di bawah suatu kekuasaan dapat diatur setiap gerakannya. Melalui wacana, individu bukan hanya didefinisikan tetapi juga dibentuk, dikontrol, dan disiplinkan.

Seperti halnya dalam persidangan dispensasi pernikahan, pemohon dengan sadar mengajukan surat dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama tanpa adanya paksaan. Lewat peraturan yang tertulis dalam Undang-undang pernikahan masyarakat sudah memahami dan patuh akan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Foucault bahwa kekuasaan tidaklah dilakukan secara represif melainkan secara regulasi. Pemerintah memproduksi sebuah wacana dan pengetahuan untuk dapat mengontrol dan mendisiplinkan masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya dispensasi perkawinan di bawah umur adalah salah satu bentuk upaya pemerintah agar setiap masyarakat tidak terlepas dari peraturan yang telah ada. Dispensasi dalam permohonan perkawinan di bawah umur tidak dapat sepenuhnya diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.

Dispensasi dalam permohonan perkawinan di bawah umur itu lebih kepada pelaporan izin perkawinan di bawah umur, mengingat masih banyaknya perkawinan yang dilakukan di “bawah tangan”. Praktik relasi kekuasaan dalam dispensasi perkawinan di bawah umur sejalan dengan teori Foucault, bahwa pemerintah atau penguasa dapat mengontrol individu atau masyarakat melalui wacana dan regulasi, yaitu undang-undang dispensasi perkawinan, dengan wacana masyarakat dapat disiplinkan tanpa adanya paksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. 2012. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKIS.
- Foucault, Michel. 2002. *Wacana Kuasa dan Pengetahuan*. (Penerjemah: Yudi Santosa). Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Moleong, Lexy. J.. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.

